



**► PENATAAN KOTA**

## DPRD Pertanyakan Relokasi Permukiman

**UMBULHARJO**—Pemerintah Kota Jogja segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan Kawasan Kumuh, yang salah satunya merelokasi permukiman kumuh di bantaran sungai. Namun upaya tersebut dipertanyakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kawasan Kumuh, Christiana Agustiani mengatakan, secara umum sebagian besar anggota pansus menyepakati gagasan Pemerintah Kota Jogja dalam menata kawasan permukiman kumuh sehingga raperda yang sudah dibahas sejak 2016 lalu itu sudah masuk tahap finalisasi.

Namun, sebelum menyelesaikan pembahasan, pihaknya kembali mengundang Pemerintah Kota Jogja terkait dengan pasal yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Jogja bersedia mencari lokasi untuk merelokasi warga yang tinggal di kawasan kumuh. "Persoalannya lahan di Kota ini terbatas bagaimana caranya membangun kembali permukiman kumuh?" kata Christiana, saat dihubungi Selasa (7/11).

Christiana mengatakan pansus menyetujui usulan tersebut, terutama untuk warga yang tinggal di kawasan bahaya bencana di sepanjang bantaran sungai. Hanya pihaknya membutuhkan penjelasan sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Jogja menyediakan lokasi baru bagi penghuni kawasan kumuh.

Rencananya pembahasan akhir Raperda Kawasan Kumuh dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Kamis (9/11). "Reloksi permukiman kumuh ini butuh komitmen nyata," ujar politikus Gerindra yang biasa disapa Ana ini.

Kepala DPUPKP Kota Jogja Agus Tri Haryono mengatakan aturan penataan kawasan kumuh tidak hanya relokasi. Menurut dia, sebelum relokasi dilakukan ada tahapan penanganan mulai dari pemugaran, peremajaan hingga pembangunan kembali permukiman. "Permukiman kembali itu jika peremajaan dan pemugaran sudah tidak bisa dilakukan," kata Agus.

Namun, ia belum bisa menyampaikan banyak soal membangun kembali permukiman. Yang jelas, Agus menyatakan penataan kawasan permukiman kumuh Jogja mendapat perhatian penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk upaya membangun kembali permukiman jika memungkinkan.

Salah satu komitmennya, kata dia, menyusun perda yang mendukung penanganan kawasan kumuh, mengalokasikan anggaran penanganan kumuh setiap tahun untuk mewujudkan 0% kumuh pada 2019, menyediakan perumahan layak dan terjangkau.

Data PUPKP Kota Jogja luas kawasan kumuh mencapai 174,4 hektare. Sampai akhir tahun ini ada 30 hektare yang ditangani melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Beberapa wilayah penanganan kawasan kumuh ada di bantaran Sungai Winongo dan Sungai Gajahwong. (Ujang Hasanudin)

**Kawasan Kumuh di DIY**

Kategori	Luas (hektare)
Tanggung jawab Pemerintah Pusat	696,89
Tanggung jawab Pemda DIY	96,89
Tanggung jawab kabupaten/kota	165,94
<b>TOTAL KAWASAN KUMUH</b>	<b>959,22</b>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005